



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

(LKjIP)
KECAMATAN LOA KULU
TAHUN 2023

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN LOA KULU

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Loa Kulu Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kecamatan Loa Kulu Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kecamatan Loa Kulu disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Loa Kulu Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Loa Kulu Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kecamatan Loa Kulu kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Loa Kulu, Februari 2024

Camat Loa Kulu,



H. ADRIANSYAH, SH

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
Struktur Organisasi	1
1.2 Dasar Hukum	2
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA.....	2
2.1 Perencanaan Strategis.....	2
2.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah	2
2.3 Tujuan dan Sasaran	3
2.4 Strategi	3
2.5 Arah Kebijakan.....	3
2.6 Program	4
2.7 Perjanjian Kinerja	7
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja.....	14
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023	20
BAB IV	
PENUTUP	32
Kesimpulan	32
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

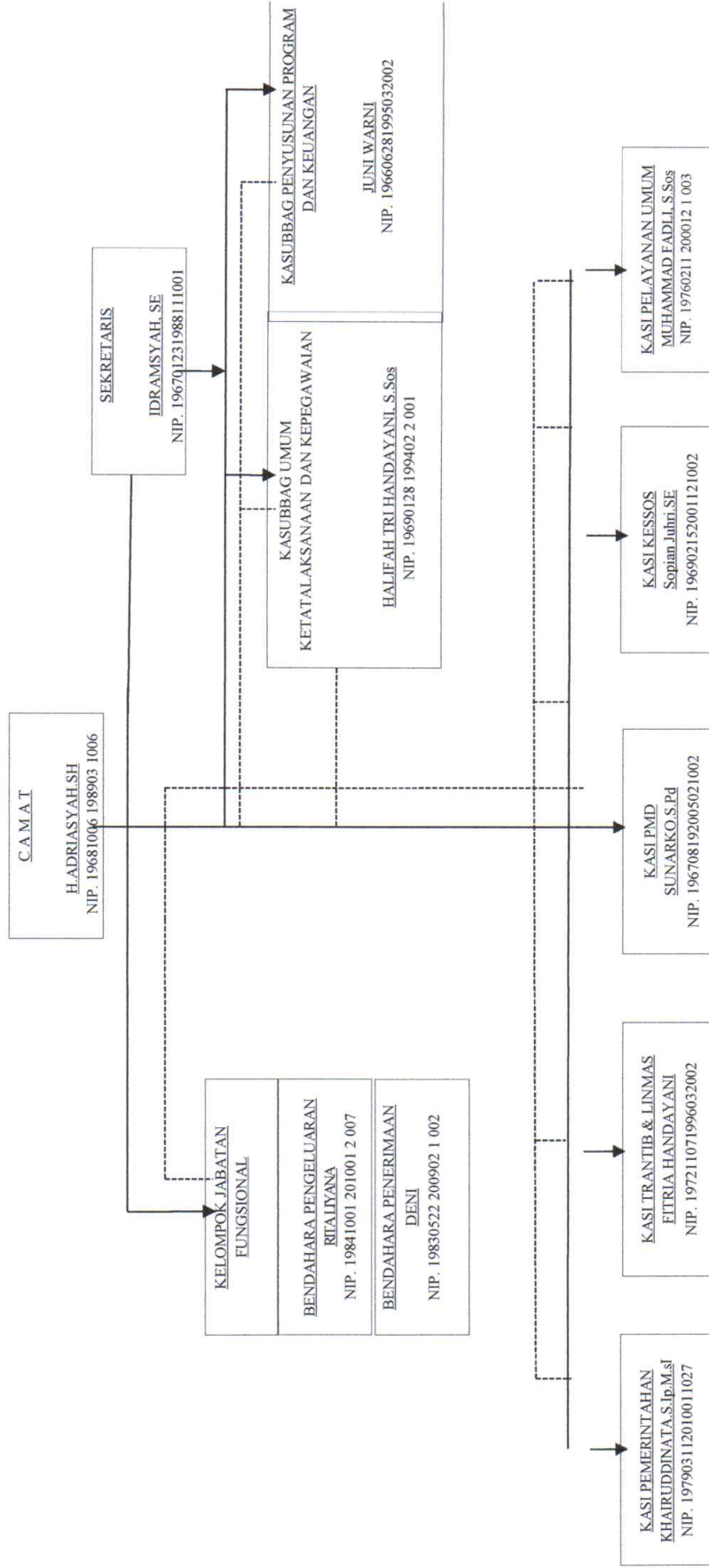
Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT LOAKULU

Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan



Keterangan :
: Fungsi Komando
: Koordinasi

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Loa Kulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

.....

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

.....

1.5 Uraian Singkat Organisasi

.....

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Loa Kulu adalah Misi Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani, Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya, Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah, Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Loa Kulu Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 1

Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi :				
"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Presentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan yang di tindaklanjuti
				Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum

2.4 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Kecamatan Loa Kulu untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. Meningkatkan Kinerja dan Tata Kelola Kecamatan
6. Meningkatkan Pernerdayaan Masyarakat Desa
7. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

2.5 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Kecamatan Loa Kulu Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2

Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
		Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

		Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Meningkatkan Kualitas dan Implementasi Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Kinerja
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5.	Meningkatnya Kinerja dan Tata Kelola Kecamatan	Meningkatkan Koordinasi Kinerja dan Tata Kelola Kecamatan
6.	Meningkatkan Pernerdayaan Masyarakat Desa	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

2.6 Program

Program yang dilaksanakan Kecamatan Loa Kulu untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel3

Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Loa Kulu	Predikat Akuntabilitas Kecamatan Loa Kulu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Loa Kulu	Nilai indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Loa Kulu	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Meningkatnya Aksesibilitas Antar dan Inter Wilayah Kecamatan Loa Kulu	Cakupan aksesibilitas antar wilayah Kecamatan Loa Kulu	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

2. 7 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Loa Kulu Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4

Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BERHASIL/ GAGALNYA CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Loa Kulu	Predikat Akuntabilitas Kecamatan Loa Kulu	Nilai	75	75	100 %	$= 75 / 75 * 100\%$ $= 100\%$	1. Adanya gedung pelayanan paten sebagai pelayanan masyarakat kecamatan loa kulu 2. Tersedianya data fisik dan administrasi ketika pihak pemeriksa meminta data kelengkapan pendukungnya 3. Pengelolaan aplikasi, arsip dan aset yang semakin baik (Faktor Pendukung) Terkendala dengan kondisi gedung kantor camat yang masih dalam proses rehabilitasi (Faktor Penghambat)
		Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat pada tahun berjalan maka Wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100	100	100 %	$= 100/100*100\%$ $= 100\%$	Catatan Hasil Reviu Laporan Keuangan Kantor Camat Loa Kulu untuk periode yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 sudah ditindaklanjuti
		Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100	100	100%	$= 100/100*100\%$ $= 100\%$	Aset yang berstatus dalam penelusuran sudah tercatat seluruhnya di BMD dan dalam kertas kerja rekonsiliasi aset beserta rincian aset yang ditelusuri.
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	25	25	100 %	$= 25 / 25 * 100\%$ $= 100\%$	Dari 25 bidang tanah yang menjadi target semuanya sudah tercatat di BMD (KIB A) Kantor Camat Loa Kulu

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BERHASIL/ GAGALNYA CAPAIAN KINERJA
		Persentase ketepatan Input/Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SIRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023)	Persen	100	100	100 %	$= 100 / 100 \times 100\%$ $= 100\%$	Faktor pendukung pencapaian target kinerja: 1. Adanya surat edaran dan Sekretaris Daerah terkait kewajiban input RUP; 2. Tindak lanjut dan monitoring berkala dari Camat selaku kepala OPD; 3. Pada Belanja Operasional sudah di input pada ke Aplikasi SIRUP
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100 %	$= 100/100 \times 100\%$ $= 100\%$	Semua pejabat yang wajib lapor sudah mengisi LKHPN dan terverifikasi lengkap sebelum tanggal 31 maret 2023
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100 %	$= 100/100 \times 100\%$ $= 100\%$	Semua ASN dilingkungan Kantor Camat Loa Kulu Sudah melaporkan LHKASN Per tanggal 31 Maret 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BERHASIL/ GAGALNYA CAPAIAN KINERJA
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	70,5	93,57 %	$= 70,5/60 \times 100\%$ $= 1,175\%$	1 Nilai diperoleh dari hasil audit oleh tim evaluasi tata kelola arsip perangkat daerah 2 Hambatan yang dialami oleh Kecamatan Loa Kulu dalam mengelola arsip yaitu karena kurangnya sumber daya manusia, tidak ada arsiparis yang secara khusus mengelola arsip, belum adanya pelatihan tentang kearsipan yang diberikan kepada aparat Kecamatan, serta sarana dan prasarana yang belum tersedia secara lengkap dalam mengelola arsip.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BERHASIL/ GAGALNYA CAPAIAN KINERJA		
								No	Unsur Pelayanan	Nilai Interval, Indeks & Mutu Pelayanan
								1	Kesesuaian Persyaratan	3,6
								2	Prosedur Pelayanan	3,51
								3	Kecapatan Pelayanan	3,44
								4	Kesesuaian / Kewajaran Biaya	3,92
								5	Kesesuaian Pelayanan	3,54
								6	Kompetensi Petugas	3,58
								7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,66
								8	Penanganan Pengaduan	3,74
								9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,62
									Indeks Kepuasan Masyarakat	90,57
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Loa Kulu	Nilai indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Loa Kulu	Nilai	70	90,57	100 %	$= 90,57/70 \times 100\%$ $= 1,294\%$		Kategori Pelayanan	Sangat Baik
									Nilai Pelayanan	A
								Nilai Indeks kepuasan pelayanan Kecamatan Loa Kulu diperoleh dari hasil survey dengan menggunakan kuesioner yang diolah sesuai dengan standar unsur pelayanan publik.		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BERHASIL/ GAGALNYA CAPAIAN KINERJA
3.	Meningkatnya Aksesibilitas Antar dan Inter Wilayah Kecamatan Loa Kulu	Cakupan aksesibilitas antar wilayah Kecamatan Loa Kulu	Persen	100	100	100 %	$= \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$	1. Jumlah desa/kelurahan yang terhubung ke ibu kota kecamatan melalui jalur darat diberi nilai 1 2. Jumlah Desa/kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Loa Kulu adalah 15 Desa

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BERHASIL/ GAGALNYA CAPAIAN KINERJA
4.	Meningkatnya Penyaliran Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan wilayah kecamatan Loa Kulu	Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan alternatif kebijakan berdasarkan wilayah kecamatan Loa Kulu	Persen	100	100	100 %	$= \frac{100}{100} \times 100\%$ $= 100\%$	Ketersediaan data yang dapat dipenuhi dan disajikan oleh Kecamatan Loa Kulu untuk perumusan alternative kebijakan berdasarkan wilayah kecamatan yaitu diperoleh dari data internal/primer yang ada pada masing-masing seksi dan data eksternal/sekunder pada Kecamatan Dalam Angka (KDA) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing – masing indikator maka rumus yang digunakan yaitu :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Rata-rata realisasi kinerja Kecamatan Loa Kulu tahun 2023 sebesar 97,40%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Loa Kulu	Predikat Akuntabilitas Kecamatan Loa Kulu	Nilai	75	75	100 %	Sedang
	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat pada tahun berjalan maka Wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari Kerja	Persen	100	100	100 %	Sangat Tinggi
	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam	Persen	100	100	100 %	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
	Penelusuran					
	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	16	16	100 %	Sangat Tinggi
	Persentasi ketepatan Input Rencana umum pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Maksimal 14 hari kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023)	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LKHPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100 %	Sangat Tinggi
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100 %	Sangat Tinggi
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	Sangat Baik (BB) 70,5	1,175 %	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Loa Kulu	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Loa Kulu	Nilai	70	Sangat Baik (A) 90,57	1,294%	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Loa Kulu	Cakupan aksesibilitas antar wilayah Kecamatan Loa Kulu	Persen	77,88	77,88	100 %	Sangat Tinggi
Meningkatnya Penyajian Data menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan wilayah kecamatan Loa Kulu	Presentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan alternatif kebijakan berdasarkan wilayah kecamatan Loa Kulu	Persen	100	100	100 %	Sangat Tinggi
Rata-rata					97,40 %	Sangat Tinggi

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja ke - 1

Target kinerja “Indikator Kinerja ke - 1” tahun 2023 memperoleh realisasi 75 dari capaian kinerja 100% sehingga target kinerja tercapai target dengan kriteria penilaian Sedang.

2) Indikator Kinerja ke - 2

Target kinerja “Indikator Kinerja ke - 2” tahun 2023 yaitu menindak lanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat pada tahun berjalan maka Wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja dari hasil tindak lanjut tersebut diperoleh capaian kinerja 100% sehingga target kinerja tercapai target dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi.

3) Indikator Kinerja ke - 3

Target kinerja “Indikator Kinerja ke - 3” tahun 2023 sebesar 100% dari persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran, dan terealisasi sebesar 100, ini

diperoleh dari Berita Acara hasil Rekonsiliasi Aset dan Keuangan, Kertas Kerja Rekonsiliasi Aset dan Keuangan dan Daftar Inventaris barang yang memuat seluruh Barang Milik Daerah yang dilakukan Penelusuran sudah teridentifikasi semua dan tercatat dalam Aplikasi SIMDA BMD. Atas hasil tersebut capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100, sehingga target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi.

4) Indikator Kinerja ke - 4

Target kinerja “Indikator Kinerja ke - 4” tahun 2023 yaitu pengamanan bidang tanah sebanyak 16 item. Dari target tersebut, semua aset tanah yang berada di Kecamatan Loa Kulu semua sudah tercatat dalam Aplikasi Simda BMD pada KIB A.

5) Indikator Kinerja ke - 5

Target kinerja “Indikator Kinerja ke - 5” tahun 2023 yaitu sebesar 100% dari target Persentasi ketepatan Input Rencana umum pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Maksimal 14 hari kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022), Kecamatan Loa Kulu pada Belanja Operasional belum semuanya di input pada Aplikasi SiRUP sehingga realisasi dan Capaian Kinerja hanya mencapai target 100% dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi.

6) Indikator Kinerja ke - 6

Target kinerja “Indikator Kinerja ke - 6” tahun 2023 yaitu sebesar 100%, berdasarkan hasil monitoring dari 9 pejabat struktural yang wajib lapor semuanya sudah mengisi LHKPN di website <https://elhkpn.kpk.go.id> sebelum tanggal 31 Maret 2023. karena itu indikator ke - 6 diperoleh realisasi sebesar 100% dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi.

7) Indikator Kinerja ke - 7

Target kinerja “Indikator Kinerja ke - 7” tahun 2023 yaitu sebesar 100%, berdasarkan hasil monitoring sejumlah 58 ASN Kecamatan Loa Kulu semuanya sudah mengisi LHKASN di website <https://siharka.menpan.go.id> sebelum tanggal 31 Maret 2023. karena itu indikator ke - 7 diperoleh realisasi sebesar 100% dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi.

8) Indikator Kinerja ke - 8

Target kinerja “Indikator Kinerja ke - 8” tahun 2023 Tata Kelola Arsip Perangkat ,5Daerah Kecamatan Loa Kulu memperoleh predikat/nilai Sangat Baik (BB) / 70,5 dari hasil audit Tim Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil tersebut, capaian realisasi kinerja pada indikator ini sebesar 1,175% dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi. Tercapainya realisasi target capaian kinerja disebabkan beberapa faktor penghambat diantaranya yaitu Sumber Daya Manusia, ada arsiparis yang secara khusus mengelola arsip, ada pelatihan tentang kearsipan yang diberikan kepada aparatur Kecamatan, serta prasarana dan sarana yang tersedia cukup untuk menunjang dalam mengelola kearsipan. Kedepannya Kecamatan Loa Kulu akan melengkapi Prasarana dan Sarana penunjang lainnya dalam pengelolaan arsip serta akan berkoordinasi dan konsultasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan asrip agar lebih baik dan benar.

9) Indikator Kinerja ke - 9

Target kinerja “Indikator Kinerja ke - 9” tahun 2023 tentang Nilai/Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan Loa Kulu mendapat realisasi sebesar 90,57 dan capaian kinerja dari target indikator sebesar 1,294% dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi.

10) Indikator Kinerja ke - 10

Target kinerja “Indikator Kinerja ke - 10” tahun 2023 yaitu Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah Kecamatan Loa Kulu dengan realisasi sebesar 77,88. dari hasil tersebut capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi.

11) Indikator Kinerja ke - 11

Target kinerja “Indikator Kinerja ke - 11” tahun 2023 yaitu Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan alternatif kebijakan berdasarkan wilayah kecamatan Loa Kulu sebesar 100%. data ini diperoleh dari data internal/primer yang ada pada masing-masing seksi dan data eksternal/sekunder pada Kecamatan Dalam Angka (KDA) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 97,40%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 96,37%. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 1,03 %. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 6**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022				Tahun 2023				Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Loa Kulu	Predikat Akuntabilitas Kecamatan Loa Kulu	Nilai	75	75	100 %	75	75	100 %	75	100 %	Tetap
	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat pada tahun berjalan maka Wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari Kerja	Persen	100	100	100 %	2	2	100 %	2	100 %	Tetap
	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100	100	100 %	100	100	100 %	100	100 %	Tetap
	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	16	16	100%	16	16	100%	16	100%	Tetap
	Persentase ketepatan Input Rencana umum pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan	Persen	100	50	50 %	100	100	100%	100	100%	Meningkat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%Realisasi Kinerja	
	Maksimal 14 hari kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023)								
	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LKHPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100 %	100	100	100 %	Tetap
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100 %	100	100	100 %	Tetap
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	CC(CUKUP) 56,14	92 %	Baik (B) 60-70	Sangat Baik (BB) 70,5	1,175 %	Meningkat
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Loa Kulu	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Loa Kulu	Nilai	70	70	100 %	70	Sangat Baik (A) 90,57	1,294%	Meningkat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realiasi Kinerja	%Realisasi Kinerja	
Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Loa Kulu	Cakupan aksesibilitas antar wilayah Kecamatan Loa Kulu	Persen	77,88	77,88	100 %	77,88	77,88	100 %	Tetap
Meningkatnya Penyajian Data menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan wilayah kecamatan Loa Kulu	Presentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan alternatif kebijakan berdasarkan wilayah kecamatan Loa Kulu	Persen	100	100	100 %	100	100	100 %	Tetap
Rata- rata			96, 37%					97,40%	Meningkat

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Loa Kulu sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
1	Predikat Akuntabilitas Kecamatan Loa Kulu	Nilai	75	75	100 %
2	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat pada tahun berjalan maka Wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari Kerja	Persen	1		60 %
3	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100	100	100 %
4	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	16		0%
5	Persentase ketepatan Input Rencana umum pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Maksimal 14 hari kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023)	Persen	100	100	100 %
6	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LKHPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100 %

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
7	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100 %
8	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	Sangat Baik (BB) 70,5	1,175 %
9	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Loa Kulu	Nilai	70	Sangat Baik (A) 90,57	1,294%
10	Cakupan aksesibilitas antar wilayah Kecamatan Loa Kulu	Persen	77,88	77,88	100 %
11	Presentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan alternatif kebijakan berdasarkan wilayah kecamatan Loa Kulu	Persen	100	100	100 %

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ada pada Kecamatan Loa Kulu dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 97,40%, dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

KODE	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.231.500,00	5.789.500,00	92,91	442.000,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	4.207.750,00	84,16	792.250,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.500.000,00	3.973.000,00	88,29	527.000,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.396.000,00	4.707.830,00	87,25	688.170,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.900.000,00	4.810.000,00	81,53	1.090.000,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	4.905.000,00	98,10	95.000,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	3.569.000,00	71,38	1.431.000,00
	TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	37.027.500,00	31.962.080,00	86,32	5.065.420,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.197.137.650,00	5.928.507.873,00	82,37	1.268.629.777,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.060.000,00	872.000,00	17,23	4.188.000,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	139.840.000,00	133.773.500,00	95,66	6.066.500,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN	7.342.037.650,00	6.063.153.373,00	82,58	1.278.884.277,00

KODE	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	PERANGKAT DAERAH				
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	65.200.000,00	65.200.000,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	3.545.000,00	70,90	1.455.000,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	70.200.000,00	68.745.000,00	97,93	1.455.000,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	158.400.000,00	147.060.000,00	92,84	11.340.000,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	158.400.000,00	147.060.000,00	92,84	11.340.000,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.628.000,00	84.546.000,00	96,48	3.082.000,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.06.4	Penyediaan bahan Logistik Kantor	90.000.000,00	89.625.490,00	99,58	374.510,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	24.999.900,00	100,00	100,00

KODE	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.500.000,00	5.400.000,00	98,18	100.000,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.818.000,00	204.575.156,00	99,88	242.844,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	57.820.000,00	55.583.000,00	96,13	2.237.000,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.06.11	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	450.000.000,00	355.796.000,00	79,07	94.204.000,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	943.666.000,00	843.425.546,00	89,38	100.240.454,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.122.000.000,00	823.630.000,00	73,41	298.370.000,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000,00	279.228.000,00	93,08	20.772.000,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.07.5	Pengadaan Mebel	30.000.000,00	27.868.000,00	92,89	2.132.000,00
	TOTAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.452.000.000,00	1.130.726.000,00	77,87	321.274.000,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.989.000,00	99,45	11.000,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.08.2	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.869.800,00	187.617.148,00	97,78	4.252.652,00

KODE	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	832.724.552,00	815.603.772,00	97,94	17.120.780,00
	TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.061.594.352,00	1.040.209.920,00	97,99	21.384.432,00
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
0.00 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	250.000.000,00	237.160.060,00	94,86	12.839.940,00
	TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.314.925.502,00	9.562.441.979,00	84,51	1.752.483.523,00
7.01 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 2.2.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
	TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	250.000.000,00	237.160.060,00	94,86	12.839.940,00
7.01 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				
7.01 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 2.2.02.2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	4.870.000,00	97,40	130.000,00
7.01 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 2.2.02.3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	107.000.000,00	104.355.600,00	97,53	2.644.400,00
	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	112.000.000,00	109.225.600,00	97,52	2.774.400,00

KODE	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
7.01 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
7.01 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 2.2.04.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	615.489.000,00	519.607.402,00	84,42	95.881.598,00
7.01 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 2.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	72.821.849.000,00	72.529.858.424,00	99,60	291.990.576,00
	TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	73.549.338.000,00	73.158.691.426,00	99,47	390.646.574,00
7.01 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 3.2.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	TOTAL KEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	73.437.338.000,00	73.049.465.826,00	99,47	387.872.174,00
7.01 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
7.01 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 3.2.01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
7.01 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 3.2.01.3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
	TOTAL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
7.01 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 4.7.03	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	TOTAL KEGIATAN KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
7.01 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 4.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				

KODE	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
7.01 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 4.7.03.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	334.978.291,00	258.898.200,00	77,29	76.080.091,00
	TOTAL PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	334.978.291,00	258.898.200,00	77,29	76.080.091,00
7.01 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 5.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
	TOTAL KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	334.978.291,00	258.898.200,00	77,29	76.080.091,00
7.01 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				
7.01 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 5.2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	230.000.000,00	222.789.000,00	96,86	7.211.000,00
	TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	230.000.000,00	222.789.000,00	96,86	7.211.000,00
7.01 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 6.2.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	230.000.000,00	222.789.000,00	96,86	7.211.000,00
7.01 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 6.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
7.01 . 7-01.1-03.0-00.03.0.0 . 6.2.01.3	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	75.000.000,00	74.900.000,00	99,87	100.000,00
	JUMLAH	85.544.241.793,00	83.317.720.605,00	97,40	2.226.521.188,00

Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebesar 97,40 % dari total pagu anggaran yang telah diberikan. Diharapkan capaian ini dapat dievaluasi dengan formulasi baru pada tahun berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Secara umum capaian kinerja Kecamatan Loa Kulu Tahun 2023 sebesar 97,40% (Sangat Tinggi).
- 2) Program dan kegiatan pada Kecamatan Loa Kulu Tahun Anggaran 2023 telah terserap dengan baik.
- 3) Keberhasilan Capaian kinerja Tahun 2023 ini merupakan hasil kerjasama seluruh aparatur di lingkungan kecamatan Loa Kulu.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Loa Kulu Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Loa Kulu, Februari 2024
CAMAT LOA KULU,



H. ADRIANSYAH, SH
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19681006 198903 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.1-03.0-00.03 Kecamatan Loa Kulu Unit
Organisasi : 7-01.1-03.0-00.03.000 Kecamatan Loa Kulu
Sub Unit Organisasi : 7-01.1-03.0-00.03.000.000 Kecamatan Loa Kulu

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5	BELANJA DAERAH	85.544.241.793,00	83.317.360.605,00	97,40	36.984.184.785,00
5.1	BELANJA OERASI	81.917.990.078,00	80.242.091.565,00	97,95	36.812.772.645,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.566.528.710,00	6.262.679.873,00	82,77	6.369.255.089,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.351.461.368,00	73.979.411.692,00	99,50	30.443.517.556,00
5.2	BELANJA MODAL	3.626.251.715,00	3.075.269.040,00	84,81	171.412.140,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.538.272.000,00	2.009.676.000,00	79,17	44.126.140,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.087.979.715,00	1.065.593.040,00	97,94	127.286.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(85.544.241.793,00)	(83.317.360.605,00)	0	(36.984.184.785,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(85.544.241.793,00)	(83.317.360.605,00)	0	(36.984.184.785,00)